



LAPORAN KINERJA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU**

TAHUN ANGGARAN 2024





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Struktur Organisasi	4
1.3 Aspek Strategis	10
1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis	12
1.5 Strategis dan Kebijakan	13
1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama	19
2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2 Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	52
1.1 Simpulan	52
1.2 Strategi Peningkatan Kinerja	53
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran pencapaian intansi akan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator. Diharapkan penyajian laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif dan efisien.

Pada tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru telah menyusun Rencana Kerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 rencana tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026.

Banjarbaru, Januari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Banjarbaru

H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP. 19650910 198602 1 008



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru berpedoman pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

Fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebelumnya berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan SKPD dengan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Namun dengan ditetapkannya Perda Nomor 16 tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dipisah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru, dimana fungsi pengelolaan keuangan dan aset berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sedangkan fungsi pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota.

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dengan Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dimaksudkan untuk peran serta



mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru di tahun yang akan datang. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Format LKPJ dan LPPD
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - b. Sub Bidang Evaluasi Anggaran
 - c. Sub Bidang Regulasi dan Kebijakan Anggaran

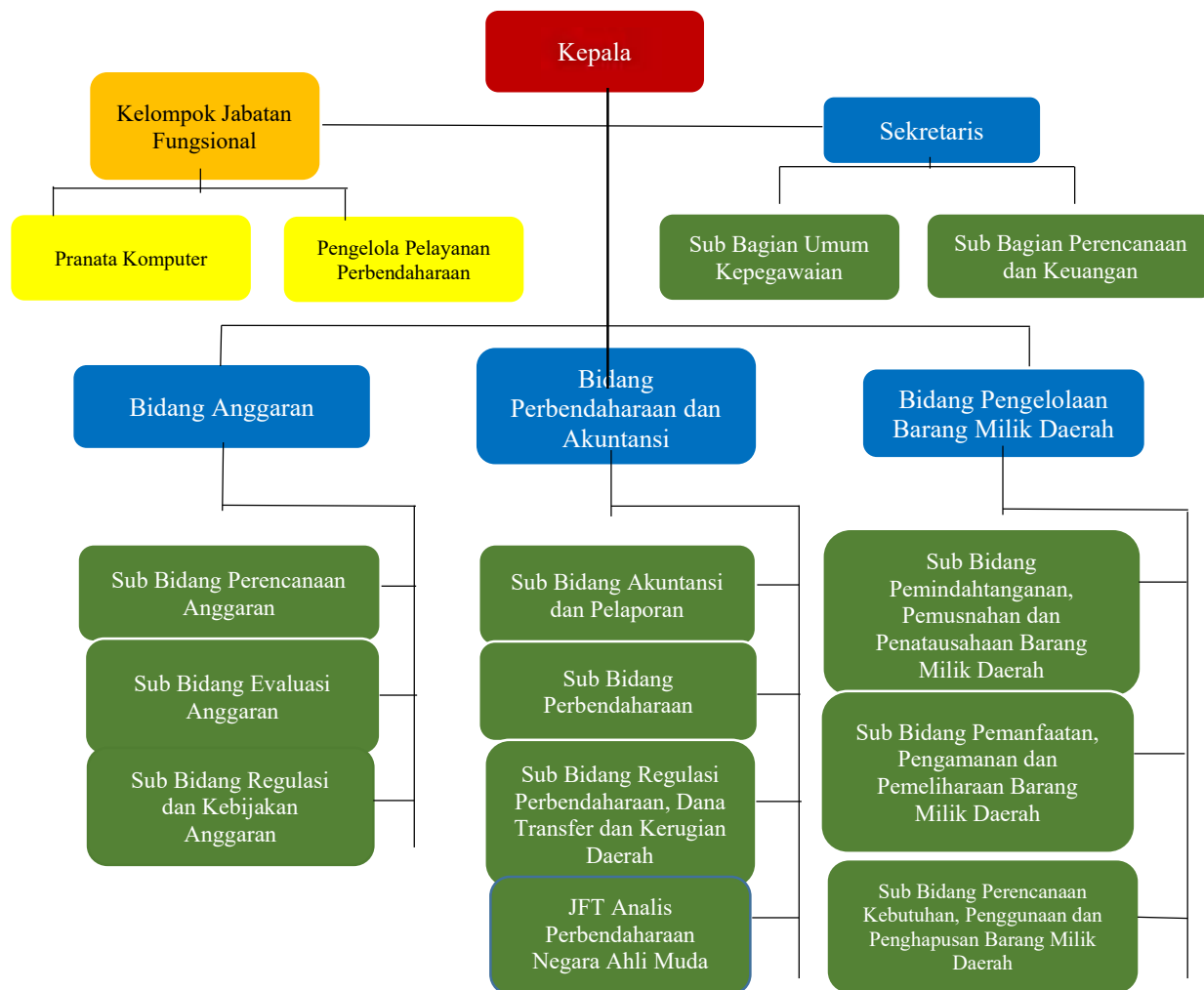


4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan
 - c. Sub Bidang Regulasi Perbendaharaan, Dana Transfer dan Kerugian Daerah
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - c. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

STRUKTUR ORGANISASI





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dan dibantu oleh Tenaga Kontrak sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Berdasarkan Golongan

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	6 orang	
2.	Golongan III	27 orang	
3.	Golongan II	1 orang	
	JUMLAH	34 orang	

Tabel 1.2. PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Berdasarkan Jabatan

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Badan	1 Orang	
2.	Sekretaris	1 Orang	
3.	Kepala Bidang	3 Orang	
4.	Kepala Sub Bidang	9 Orang	
5.	Kepala Sub Bagian	2 Orang	
6.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1 Orang	
7.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	2 Orang	
8.	Pranata Komputer Ahli Muda	1 Orang	
9.	Fungsional Umum	14 Orang	
	JUMLAH	34 Orang	

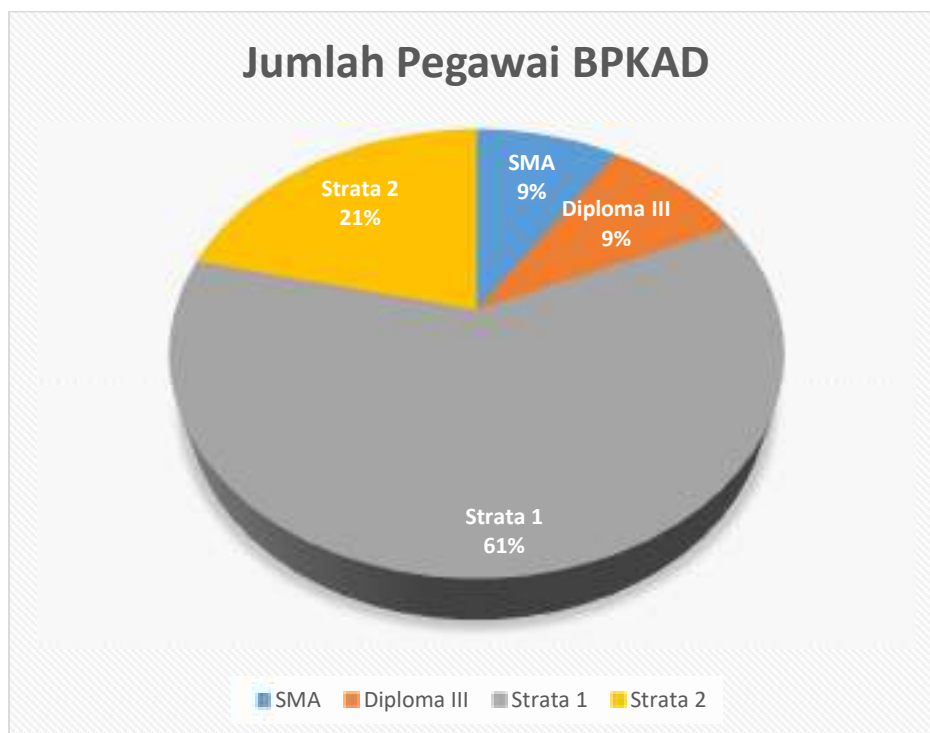


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 1. 3. PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SMA	3 Orang	
2.	Diploma III	3 Orang	
3.	Strata 1	21 Orang	
4.	Strata 2	7 Orang	
	JUMLAH	34 Orang	

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD berdasarkan tingkat pendidikan





Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.3 Aspek Strategis

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah telah dibentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, peranan penting Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah / kekayaan daerah Kota Banjarbaru dan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun aspek strategi yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tantangan	Peluang
Kurangnya tenaga ahli mengoperasikan aplikasi sistem pengelolaan keuangan	Tersedianya jumlah Aparatur Sipil Negara yang cukup
Kurangnya penyelenggaraan Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah	Adanya komitmen Walikota untuk melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; Potensi pembangunan wilayah Kota Banjarbaru dan jumlah aparatur serta banyak kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang harus dipenuhi dan sejalan dengan komitmen kepala daerah untuk peningkatan sumber daya manusia
Adanya Tuntutan pengembangan aplikasi teknologi informasi di era digitalisasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dari aplikasi SIPD beralih ke SIPD RI	Adanya aplikasi SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah secara online
Adanya tuntutan Penyesuaian regulasi dari pusat terkait kodifikasi dan nomenklatur rekening belanja daerah yang berubah-ubah	Tersedianya aplikasi/database keuangan yang sudah terintegrasi dengan Kementerian yang membidangi
Masih adanya SKPD yang menyampaikan Pergeseran dan perubahan anggaran di luar jadwal kegiatan	Adanya Kepatuhan SKPD terhadap arahan TIM TAPD dan PPKD
Masih kurangnya optimalisasi penyediaan anggaran untuk kegiatan SKPD	Mengakomodasi kebutuhan penganggaran SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Masih kurangnya kecepatan dan kemudahan akses informasi data dan publikasi terkait keuangan daerah	Adanya pelayanan yang akuntabel dan transparan



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Tantangan	Peluang
Masih terbatasnya SDM yang menguasai perbendaharaan dan Akuntansi keuangan	SDM yang kurang menguasai perbendaharaan dan Akuntansi keuangan dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui DIKLAT dan penyusunan peta jabatan untuk rekrutmen
Masih kurang optimalnya waktu proses penyaluran dana melalui penerbitan SP2D	Adanya metode yang cepat dan andal dalam Pelaksanaan verifikasi atas permohonan penyaluran dana
Masih kurangnya kecepatan Perubahan data penggajian ASN yang Sangat dinamis (Perubahan naik pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, iuran kesehatan, purna tugas) yang menyangkut Perubahan data ASN	Adanya jalinan kerjasama dengan Instansi yang terkait
Masih adanya pengelola BMD pada SKPD yang merangkap tugas dengan jabatan lain sehingga tumpang tindih dalam menyelesaikan tugasnya	Adanya tugas pokok dan fungsi pengelola
Masih adanya SDM pengelola BMD yang kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan BMD	SDM pengelola BMD masih dapat ditingkatkan pengetahuannya melalui diklat pengelolaan BMD
Masih terdapat BMD yang tidak didukung dengan dokumen legal formal yang sah	Adanya kerjasama dengan instansi terkait
Belum optimalnya pemanfaatan BMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Adanya kewenangan untuk mengelola BMD sesuai ketentuan yang berlaku
Belum tersedianya tempat untuk menyimpan barang persediaan SKPD dan berkas yang masuk	Adanya fasilitas ruangan yang bersih dan rapi



1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan Tupoksi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

Permasalahan	Akar Masalah
Perlunya peningkatan penerapan transaksi Non Tunai pada Belanja Perangkat Daerah	1. Belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 2. Belum Optimalnya penerapan Analisa Standar Belanja (ASB) 3. Masih terdapat penggunaan akun anggaran yang belum sesuai dengan peruntukannya
Perlunya peningkatan penerapan Transaksi Non Tunai pada belanja Perangkat Daerah	1. Belum optimalnya fitur pembayaran berbasis elektronik di Bendahara Pengeluaran 2. Legalitas bukti transaksi belum sepenuhnya mendukung proses elektronifikasi
Perlunya peningkatan pengelolaan data pegawai yang berdampak kepada besar nilai gaji PNS belum sepenuhnya sesuai dengan waktu yang seharusnya	1. Masih kurangnya ketepatan waktu penerbitan SK dengan tanggal mulai berlakunya
Perlunya peningkatan pengelolaan barang persediaan	1. Pencatatan belum dilaksanakan secara tepat Waktu
Perlunya peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan	1. Masih kurangnya pengungkapan dalam Laporan Keuangan masing-masing entitas akuntansi sebagai bahan konsolidasi 2. Masih kurangnya pemahaman menyeluruh atas sebuah transaksi
Belum Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Rencana kerja Perangkat Daerah terkait dengan pengadaan barang belum bersesuaian dengan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah; 2. Belum memadainya kapasitas SDM pengurus barang dalam penatausahaan BMD; 3. Lemahnya pengendalian pengelolaan BMD Perangkat Daerah;



ISU-ISU STRATEGIS

Dari kedua faktor tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menentukan isu-isu strategis yang telah dirumuskan adalah : **Belum optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.**

1.5 Strategis dan Kebijakan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

VISI : "BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA " BANJARBARU JUARA)

Visi pembangunan jangka menengah tersebut mengandung makna dapat dijelaskan bahwa :

1. **MAJU** : Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi
2. **AGAMIS** : Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi tenwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025
3. **SEJAHTERA** : SDM yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan Pemerintahan yang baik.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

TUJUAN :

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun kedepan yang didasarkan pada rumusan visi dan misi serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 adalah :

STRATEGI :

Strategi adalah merupakan langkah-langkah yang berisi program-program untuk mewujudkan visi dan misi, di samping strategi hal penting yang lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dari waktu ke waktu.

Strategi yang tepat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatkan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
				Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
				Meningkatkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 31 Maret
		Meningkatnya kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru	Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				Meningkatkan Koodinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

				Meningkatkan Proses Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu
			Peningkatan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Meningkatkan Implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Peningkatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatkan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
				Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
				Meningkatkan penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD Kota Banjarbaru	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Penyusunan Standar Harga
				Meningkatkan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
				Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Meningkatkan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
				Meningkatkan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
				Meningkatkan Rekonsiliasi data BMD Perangkat Daerah secara berkala
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota



1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penulisan laporan kinerja disusun dalam 4 bab yaitu:

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Struktur Organisasi
	1.3 Aspek Strategis
	1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis
	1.5 Strategi dan Kebijakan
	1.6 Sistematika Penyajian
BAB II	Perencanaan Kinerja
	2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama
	2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024
BAB III	Akuntabilitas Kinerja
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024
	3.2 Realisasi Anggaran
BAB IV	Penutup
	4.1 Simpulan
	4.2 Strategi Peningkatan Kinerja
LAMPIRAN	



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang dituangkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja merupakan sebuah langkah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan Kinerja tersebut merupakan suatu perjanjian untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut merupakan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

Supervisi maupun evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan dengan mencermati terhadap capaian kinerja yang berhasil direalisasikan sebagaimana target yang telah disepakati dalam Dokumen Penetapan Kinerja tersebut sebagai acuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas telah ditetapkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan tata kerja untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam rencana strategis tahun 2021-2026. Visi dan misi tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan khususnya pada bidang pengelolaan keuangan dan aset yang disesuaikan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Berikut ini disajikan rumusan sasaran IKU untuk tahun 2024 adalah sebagaimana berikut:



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 2.1

Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Presentase Laporan Keuangan Pemerintah yang ditetapkan Tepat Waktu	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Tepat Waktu adalah tanggal 30 Maret
		Presentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Penetapan Rancangan Perda APBD Murni Kota Banjarbaru adalah maksimal tanggal 30 Oktober dan Perubahan APBD Kota Banjarbaru maksimal tanggal 30 Agustus
		Presentase SP2D yang terbit tepat waktu	Jumlah SP2D yang terbit dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja dibagi jumlah SP2D Kota Banjarbaru yang telah dicairkan x 100
		Presentase Kesesuaian Nilai Neraca BMD dalam Neraca Keuangan	(Total Nilai BMD/Data Aset pada Neraca Pemerintah di SIMDA Keuangan) X 100



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 2.2
Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Awal Kinerja(2021)	Target Akhir Kinerja (2026)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100
		Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100
		Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	%	100	100
		Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam Neraca Keuangan	%	100	100

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut :



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100
		Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100
		Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100
		Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam Neraca Keuangan	100

Perjanjian Kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat indikator kinerja program yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis sebagaimana berikut:

2.1.1 Perjanjian Kinerja Eselon II

1. Kepala Badan adalah Pejabat Eselon II pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah Kota Banjarbaru selaku pemimpin dan bertanggung jawab memenuhi sasaran Kota Banjarbaru untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dengan menjalankan satu sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimana memiliki indikator sebagai hasil capaian dapat sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. JAINUDIN, S.Sos., M.AP.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.
Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

H. JAINUDIN, S.Sos., M.AP.
NIP. 19650910 198602 1 008



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase rancangan perda APBD dan rancangan perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100
		Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100
		Persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan tepat waktu	100
		Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam neraca keuangan	100

Program

Anggaran

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 11.462.252.445,- |
| 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 4.635.249.350,- |
| 3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 22.317.966.115,- |

Banjarmasin, 21 Januari 2024

Plhak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Plhak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

H. JAINUDIN, S. Ssa., M.AP.
NIP. 196509101986021008



2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Untuk mendukung Tercapainya Kinerja Sasaran indikator kinerja tersebut berikut pagu per program tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Program Pendukung Indikator Kinerja BPKAD dan Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	12.582.096.656,-
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.701.389.510,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.894.810.267,-
	JUMLAH	44.178.296.433,-

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Dan Sub Keempatannya:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan, Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



4. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penatausahaan Arsip Dinamis pasa SKPD

6. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan Dan mesin lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan Dan Sub Keegiatannya:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD



6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah dan Penjabaran Perubahan APBD
7. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas Daerah dan SPD
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5. Rekonsiliasi data penerimaan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemetongan atas SP2D dengan instansi terkait
6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah



3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan Dan Sub Keegiatannya nya :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Optimisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah
5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Tahun 2024, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra. Perjanjian Kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat indikator kinerja program yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis.

Untuk mendukung Tercapainya Program, Kegiatan dan Sub kegiatan untuk mendukung kinerja sasaran indikator berikut pagu tahun anggaran 2024:

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	22.317.966.115	26.894.810.267
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	327.823.900	336.920.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	37.103.900	45.120.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	290.720.000	291.800.000



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	20.101.501.585	23.940.621.227
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	19.978.324.085	23.800.374.727
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	49.249.700	66.318.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	73.927.800	73.927.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	49.232.100	49.232.100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	49.232.100	49.232.100
Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100%	30.000.000	30.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang telah mengikuti Bimtek	20 Orang	30.000.000	30.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	782.958.000	1.410.348.500



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 Paket	87.508.500	110.597.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	161.407.000	211.407.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2.000.000	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	370.000.000	914.302.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	162.042.500	172.042.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	291.202.720	392.168.480
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	163.989.200	253.393.200
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	77.213.520	88.775.280
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	95.859.610	101.135.110
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	22.500.000	22.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	32.108.410	29.017.910



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	41.251.200	49.617.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	639.388.200	634.383.950
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37.987.150	37.987.150
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	184.101.050	199.096.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150 Unit	158.620.000	158.620.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	258.680.000	238.680.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu	100%	11.462.252.445	12.582.096.656
	Persentase laporan keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
	Persentase penyelesaian rancangan PERDA APBD dan rancangan perubahan APBD yang ditetapkan			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rekomendasi KUA dan PPAS yang telah ditindak lanjuti	100%	2.030.095.050	1.994.931.550
	Persentase rekomendasi Perda tentang APBD dan Perwali tentang penjabaran APBD yang telah ditindaklanjuti	100%		
	Persentase rekomendasi Perubahan APBD Kota Banjarbaru dan Perwali tentang Penjabaran APBD Perubahan yang ditindaklanjuti	100%		
	Persentase rekomendasi Perubahan KUA dan PPAS yang telah ditindaklanjuti	100%		
	Peningkatan kualitas Penyusunan Anggaran Daerah	100%		
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	118.485.000	118.485.000
Koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	33.132.250	33.132.250
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	40.000.000	40.000.000



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	20.000.000	20.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.124.766.500	1.079.606.500
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	232.650.000	232.650.000
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	461.061.300	471.057.800
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase waktu penerbitan SP2D SKPD sesuai standar	100%	670.800.000	589.734.000
	Persentase rekomendasi pengelolaan kas daerah yang telah ditindak lanjuti	100%		
	Persentase dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang direalisasikan	100%		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	7000 Dokumen	167.900.000	177.442.000
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9 Dokumen	65.000.000	30.800.000



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	150.000.000	150.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan dan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8 Laporan	113.792.000	109.292.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	115.168.000	75.140.000
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	58.940.000	47.060.000



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase rekomendasi Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tindak lanjut sesuai SAP	100%	608.735.800	608.735.800
	Persentase tuntutan ganti rugi (TGR) yang terpenuhi	100%		
	Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan sesuai aturan	100%		
	Persentase realisasi serapan anggaran belanja daerah	92,50%		
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	104.260.500	104.260.500
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	192.273.000	192.273.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	105.720.500	105.720.500



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10 Dokumen	156.406.800	156.406.800
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	160 Orang	50.075.000	50.075.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana darurat dan mendesak yang terealisasi	100%	7.832.185.595	9.068.259.306
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	3.519.818.400	8.138.068.400
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	4.312.367.195	930.190.906
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Daerah untuk pengelolaan data keuangan	100%	320.436.000	320.436.000
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	320.436.000	320.436.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kesesuaian Nilai Neraca BMD sama dengan Nilai BMD dalam Neraca Keuangan	100%	4.635.249.350	4.701389.510
	Persentase barang persediaan BMD SKPD yang direkonsiliasi	100%		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan	Indikator	Target	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelola barang SKPD yang diawasi	100%		
	Persentase usulan standar harga/barang jasa yang terverifikasi	100%		
	Meningkaynya kualitas pengelolaan BMD skpd	100%		
Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar satuan harga yang tersusun	2 Dokumen	118.325.500	118.325.500
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	180.678.000	207.869.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3.675.629.000	3.675.628.160
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	192.126.000	113.876.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	7 Laporan	468.490.850	585.690.850

Sumber : Data Rencana dan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yang merupakan kinerja utama dari eselon II.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dipimpin oleh Kepala Badan menjalankan Sasaran Kota Banjarbaru berupa Opini WTP mempunyai 1 (satu) sasaran strategis utama yaitu :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh BPKAD dijelaskan pada tabel di bawah ini menunjukkan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024:

Tabel 1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian / Kategori
1.	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100%
2.	Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100%



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

3.	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	%	100	100	100%
4.	Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam Neraca Keuangan	%	100	100	100%

Sumber data: BPKAD Kota Banjarbaru

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, menunjukan bahwa realisasi kinerja pada semua indikator sasaran pada tahun 2024 ditargetkan **100** dan terealisasi **100** dengan capaian kinerja 100% (kategori capaian kinerja **Baik**).

Indikator pertama Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu bermakna Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang wajib disusun oleh SKPD dapat dipertanggungjawabkan dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun alasan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagian 1 “ Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.”

Tabel 1.1.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian %	Capaian Kinerja
	Target	Realisasi		
Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi

Capaian indikator atas Laporan Keuangan PD TA.2024

RUMUS UNTUK MENGUKUR INDIKATOR :

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU ADALAH TANGGAL 30 MARET



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor 13/BAST-LK/XIX.BJM/3/2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Walikota Banjarbaru menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Kota Banjarbaru Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Maret 2024
Tempat : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Pihak yang menyerahkan

Nama : H.M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H.
Jabatan : Walikota Banjarbaru

Pihak yang menerima

Nama : Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.
Jabatan : Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Pihak yang Menyerahkan



H.M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H.

Pihak yang Menerima



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel.1.1.2

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian %	Capaian Kinerja
	Target	Realisasi		
Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi

Dalam mengukur capaian indikator “Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Yang Ditetapkan Tepat Waktu” Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru didasarkan pada:

Rumus untuk mengukur indikator:

PENETAPAN RANCANGAN PERDA APBD MURNI KOTA BANJARBARU ADALAH MAKSIMAL TANGGAL 30 NOVEMBER DAN PERUBAHAN APBD KOTA BANJARBARU MAKSIMAL TANGGAL 30 SEPTEMBER



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024



WALI KOTA BANJARBARU

Banjarmaru, 16 Agustus 2024

Nomor : 900 / 702 / ANG / BPKAD
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Raperda dan Pengantar
Nota Keuangan tentang Perubahan
APBD Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2024

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin
di-
Banjarmaru

Sehubungan telah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan permohonan untuk dapat dijadwalkan Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan, atas perkenan bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALI KOTA BANJARBARU, 
H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024


WALI KOTA BANJARBARU

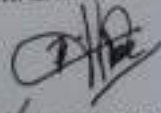
Banjarbaru, 4 September 2024

Nomor : 900 / 236 / ANG / BPKAD
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Penyerahan Raperda dan Pengantar
Nota Keuangan tentang APBD Kota
Banjarbaru Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth,
Ketua DPRD Kota Banjarbaru
di-
Banjarbaru

Sehubungan telah disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah
Kota Banjarbaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru
sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan ini
disampaikan permohonan untuk dapat dijadwalkan Rapat Paripurna Pidato
Pengantar Nota Keuangan dan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian bantuan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

B. WAKIL WALI KOTA BANJARBARU

WARTONO, SE



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Indikator Presentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu terhadap target telah tercapai yaitu 100 %. Adapun yang dimaksud terbit tepat waktu adalah maksimal SP2D terbit 2 (dua) hari kerja.

Tabel.1.1.3
Target dan Realisasi kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian %	Capaian Kinerja
	Target	Realisasi		
Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100	100	100	Sangat baik

JUMLAH SP2D YANG TERBIT DALAM WAKTU MAKSIMAL 2 (DUA) HARI KERJA DIBAGI JUMLAH SP2D PEMERINTAH KOTA BANJARBARU YANG TELAH DICAIRKAN

Jumlah SP2D UP-GU-LS-TU yang terbit selama tahun 2024 adalah sebanyak 5.610 dokumen dengan perincian sebagai berikut :

Tabel
Presentase SP2D yang terbit tepat waktu Tahun 2024

Jumlah SPM yang diterima	Jumlah SP2D yang terbit maksimal 2 (dua) hari kerja	Jumlah SP2D yang terbit lebih dari 2 (dua) hari kerja	%
5.610 dokumen	5.610 dokumen	0 dokumen	$5.610/5.610 \times 100 = 100$

indikator kinerja utama yakni Persentase kesesuaian nilai neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam neraca keuangan, berikut hasil realisasi dan capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) :

Penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala SKPD berperan penting didalamnya dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset demi tercapainya tujuan pengelolaan yang baik.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel.1.1.4

Capaian kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian %	Capaian Kinerja
	Target	Realisasi		
Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam Neraca Keuangan	100	100	100	100

Rekapitulasi Buku Inventaris
(Per 31 Desember 2024)

No	Nama Barang	Jumlah
1	TANAH	5703
2	ALAT BESAR	166
3	ALAT ANGKUTAN	1641
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	554
5	ALAT PERTANIAN	403
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	29685
7	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2183
8	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5823
9	ALAT LABORATORIUM	2050
10	ALAT PERSENJATAAN	136
11	KOMPUTER	11975
12	ALAT EKSPLORASI	4
13	ALAT PENGEBORAN	0
14	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	5
15	ALAT BANTU EKSPLORASI	0
16	ALAT KESELAMATAN KERJA	235
17	ALAT PERAGA	4
18	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	40
19	RAMBU - RAMBU	593
20	PERALATAN OLAH RAGA	517
21	BANGUNAN GEDUNG	2557
22	MONUMEN	9
23	BANGUNAN MENARA	5
24	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	232
25	JALAN DAN JEMBATAN	3141
26	BANGUNAN AIR	1140
27	INSTALASI	96
28	JARINGAN	580
29	BAHAN PERPUSTAKAAN	46566
30	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	555
31	HEWAN	20
32	BIOTA PERAIRAN	42



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

33	TANAMAN	250
34	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	9
35	ASET TETAP DALAM RENOVASI	11
TOTAL ASET		116.930

1.	T a n a h	1.162.431.484.048,28
2	Peralatan dan Mesin	832.593.594.960,53
3.	Gedung dan bangunan	1.278.304.977.979,63
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.316.490.143.648,29
5.	Aset Tetap Lainnya	55.707.817.803,11
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.672.236.000,00
7.	Akumulasi Penyusutan	-2.733.261.920.732,98
J u m l a h		2.915.938.333.706,86

RUMUS UNTUK MENGUKUR INDIKATOR :

KESESUAIAN TOTAL NILAI BMD ATAU DATA ASET DAERAH PADA NERACA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

- Aset tetap Pemko Banjarbaru sebesar : 2.915.938.333.706,86

- Aset tetap pada Neraca Pemko Banjarbaru sebesar : 2.915.938.333.706,86

sebagai bahan perbandingan antara nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 dan Aset Tetap pada Neraca Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam Neraca Keuangan didukung melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.1
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
		Target/ Realisasi/ Capaian	Target/ Realisasi/ Capaian	Target/ Realisasi / Capaian
1.	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

3.	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%
4.	Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam Neraca Keuangan	100%	100%	100%

Sumber data: BPKAD Kota Banjarbaru

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Tabel 3.1

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Banjarbaru 2024	Target RPJMD/Renstra 2026	Target Nasional 2024
1.	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	
2.	Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	
3.	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100%	100%	
4.	Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam Neraca Keuangan	100%	100%	

Keterangan : tidak terdapat target nasional untuk indikator kinerja yang sama

Untuk mempertahankan pencapaian sampai dengan target RPJMD yaitu mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selesai dengan tepat waktu didukung oleh:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Aset Daerah



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024

Tabel 4.1

Perbandingan Indikator Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tala	Kota Bjm	Prov. Kalsel
1.	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100
2.	Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100
3.	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100	100	100	100	100
4.	Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam Neraca Keuangan	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 4.1 perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Provinsi, indikator kinerja tidak sama.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tidak sama dengan IKU BPKAD Kota



Banjarbaru. Akan tetapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut selesai tepat waktu.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Banjar adalah Opini BPK, tidak sama dengan IKU BPKAD Kota Banjarbaru. Akan tetapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar selesai tepat waktu.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Banjarmasin adalah Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, realisasi nya tepat waktu
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Kalsel adalah Opini BPK, tidak sama dengan IKU BPKAD Kota Banjarbaru. Akan tetapi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selesai tepat waktu.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi Alternatif yang akan dilakukan

Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah direncanakan dengan persentase 100%, selain dari program/kegiatan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai standar Tahun 2024 yang dimotori oleh BPKAD beserta dukungan dari SKPD

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan Efisiensi. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada pengurangan sebesar Rp.13.090.500,00 digeser ke kegiatan itu sendiri untuk menambah belanja tagihan telepon dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos.

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.20.000.000,00 di geser ke kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk menambah Belanja Alat/Bahan untuk Kantor-Alat Listrik dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-perabot kantor sebesar Rp.20.000.000,00

Pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah ada pengurangan sebesar Rp.910.600.000,00 digeser ke Kegiatan itu sendiri untuk menambah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Meja Kerja Pejabat, Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat, Belanja Modal Kursi



Tamu di Ruang Pejabat, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp.832.350.000,00

Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah ada pengurangan sebesar Rp. 2.695.437.038,00 di geser ke kegiatan itu sendiri untuk menambah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 930.190.906,00.

Pada Kegiatan Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah ada pengurangan sebesar Rp. 45.160.000,00

Pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah ada pengurangan sebesar Rp. 156.700.000,00 digeser ke Kegiatan itu sendiri untuk menambah kekurangan pagu murni Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp.60.920.000,00.

Jadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pergeseran dengan persentase 4,20% dari pagu anggaran Rp 44.178.296.433,0

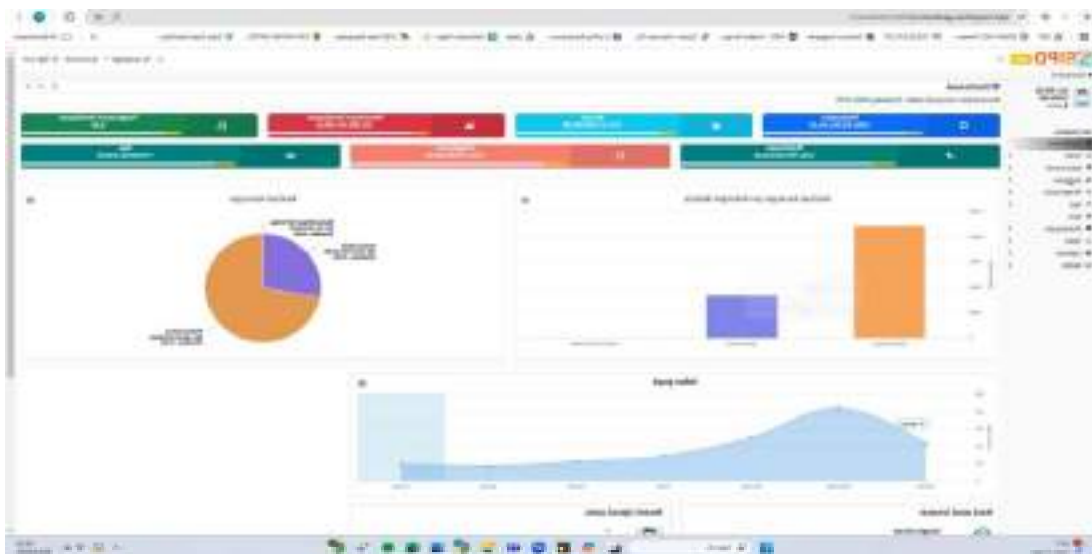
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat waktu.
2. Penatausahaan keuangan daerah BPKAD berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan teknologi yang ada sehingga administrasi penatausahaan keuangan daerah lebih cepat dan lebih valid.
3. Tingkat kedisiplinan pengguna barang perangkat daerah dalam hal penatausahaan dan pengelolaan aset tetap seperti kesadaran melakukan rekonsiliasi, kesadaran penyerahan aset yang idle dan pemanfaatan aset sesuai ketentuan.

4. Koordinasi dengan pihak Kemendagri selaku penyedia



5. Tersedianya Aplikasi pendamping yaitu SIPD BJB





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

6. Rekonsiliasi per triwulan Dilakukannya rekonsiliasi aset tiap bulan sebagai persyaratan pengajuan ganti uang TPP mendorong pengadministrasian barang milik daerah lebih tertib dan mengurangi permasalahan yang menumpuk.



7. Coaching Clinic/Pendampingan secara berkala kepada SKPD



8. Melaksanakan bimbingan teknis berupa workshop Laporan Keuangan SKPD di lingkup Kota Banjarbaru dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan serta dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kemampuan Pengelola keuangan pada SKPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan SKPD



3.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Indikator Kinerja BPKAD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.283.486.166,00 dengan relisasi anggaran sebesar Rp. 15.639.808.409,00 atau 90,49%.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2024

No	Program	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program pengelolaan keuangan daerah	12.582.096.656,-	11.472.251.958,-	91,18%
2.	Program pengelolaan barang milik daerah	4.701.389.510,-	4.167.556.451,-	88,65%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.894.810.267,-	26.346.111.267,-	97,96%
Jumlah		44.178.296.433,-	41.985.919.676,-	95,04%



BAB IV PENUTUP

1.1 Simpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan yang anggarannya berasal dari APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam menyusun laporan kinerja yang harus diperhatikan adalah pengukuran kinerja dan evaluasi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2023 merupakan tahun pertama dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru 2021 - 2026.

Mengingat beberapa indikator dari sasaran yang telah ditetapkan tersebut sangat terkait erat dengan kinerja SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka sangat diharapkan terjalinnya koordinasi yang lebih baik. Koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan maupun pelaksana kegiatan, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang pencapaian sasaran dapat lebih ditingkatkan lagi.

Hasil laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dapat dirangkumkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu sudah sesuai dengan target 100 persen yaitu 32 SKPD dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru ditetapkan tepat waktu yaitu dua bulan setelah tahun anggaran berakhir yaitu bulan Maret tahun 2024. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 baru selesai disusun sekitar bulan Maret tahun 2025.
2. Peningkatan Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru dengan Penetapan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada bulan Desember 2023 dan Rancangan Perda Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada bulan September 2024.



3. Pelayanan penerbitan SP2D sesuai dengan Peraturan Perundangan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja. Adapun targetnya adalah 100 persen dan terealisasi 100 persen.
4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan indikator persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam Neraca Keuangan bahwa nilai barang milik daerah Kota Banjarbaru sudah sesuai dengan Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.

1.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Rencana yang akan dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Penerapan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.
- Penerapan ASB fisik dan non fisik.
- Perubahan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemanfaatan Ideal Cash.
- Meningkatkan optimalisasi barang milik daerah dengan memanfaatkan berupa pinjam pakai dan sewa barang milik daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dalam mengoptimalikan Barang Milik Daerah.
- Meningkatkan pengamanan barang milik daerah khususnya pada tanah secara administrasi berupa pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Banjarbaru.
- Meningkatkan daya guna tanah, gedung dan bangunan serta kendaraan dinas roda 2 dan 4 melalui pemeliharaan.
- Penerapan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan inventarisasi dan pelaporan BMD.
- Lelang Barang Milik Daerah.
- Meningkatkan Koordinasi, pendampingan dan sosialisasi penatausahaan keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai media yang dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja yang telah dicapai dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Banjarbaru, ~~Februari~~ 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru



H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910-198602 1 008



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Murni Kepala Badan


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. JAINUDIN, S.Sos., M.AP.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.
Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 13 Januari 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA BANJARBARU,
H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
H. JAINUDIN, S.Sos., M.AP.
NIP. 19650610 196602 1 008

 Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase rancangan perda APBD dan rancangan perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100
		Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100
		Persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan tepat waktu	100
		Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam neraca keuangan	100

Program

Anggaran

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 11.462.252.445,- |
| 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 4.635.249.350,- |
| 3. Peruntang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 22.317.866.115,- |

Banjarmasin, 12 Januari 2024

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

H. JAINUDIN, S. Sos., M.AP.
NIP. 196509100956002 1 008



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. JAINUDIN, S.Sos., M.AP.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURLIANI
Jabatan : Pjs. Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 08 Oktober 2024

Pihak Kedua, Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,  NURLIANI	Pihak Pertama, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,  H. JAINUDIN, S.Sos., M.AP. NIP. 19650910 196602 1 008
---	--



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase rancangan perda APBD dan rancangan perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100
		Persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan tepat waktu	100
		Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100
		Persentase kesesuaian nilai Neraca BMD sama dengan nilai BMD dalam neraca keuangan	100

Program

Anggaran

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 12.582.096.656,- |
| 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 4.701.389.510,- |
| 3. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 26.894.810.267,- |

Banjarmasin, 22 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

NURLIANI

H. JAINUDIN, S.Sos., M.AP.
NIP. 19650810 198602 1 008



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

3. Penghargaan BPKAD Tahun 2024

NO	PENGHARGAAN	K/L PEMBERI PENGARGAAN	SKPD
1	Terbaik Kedua Penyaluran DAK Fisik Semester I Tahun 2024	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Banjarmasin	
2	Terbaik Ketiga Penyaluran DAK Non Fisik Semester I Tahun 2024	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Banjarmasin	
3	Terbaik Pertama Penyaluran Dana Bagi Hasil Semester I Tahun 2024	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Banjarmasin	
4	Terbaik Kedua Penyaluran Dana Alokasi Umum Semester I Tahun 2024	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Banjarmasin	
5	Terbaik Ketiga Penyetoran Pajak Pusat Atas Beban APBD Umum Semester I Tahun 2024	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Banjarmasin	
6	Piagam Apresiasi diberikan Kepada BPKAD Kota Banjarbaru atas sinergi dan koordinasi atas penyetoran premi demi mendukung pelaksanaan Percepatan pelayanan Taspen bagi peserta PT TASPEN (Persero) KC Banjarmasin	PT. TASPEN (Persero) KC Banjarmasin	
7	Terbaik Ketiga dalam Kinerja Pengelolaan DAK Fisik Tahun 2024	KANWIL DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, alasan Pemilihan Indikator dan Cara Penghitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		PERSENTASE RANCANGAN PERDA APBD DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD YANG DITETAPKAN TERPAT WAKTU	Makna Indikator: TERKELUARNYA KUALITAS PENYUSUNAN PERDA APBD SESUAI RETENTUM YANG BERLAKU Alasan Pemilihan: SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PEMETAPAN PERKURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERKURAN KEPALA DAERAH TENTANG PEMAHAMAN APBD SELURUH DAIRAH LAMBAT TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA Cara Penghitungan Indikator: PERSENTASE RANCANGAN PERDA APBD AKUM KOTA BANJARBARU TERPILAH ADALAH BERSAMA 30 NOVEMBER DAN PERUBAHAN APBD MUNCUL 30 SEPTEMBER	Bidang Anggaran	Jumlah Rancangan Daerah tentang APBD
		PERSENTASE APBD YANG TERPIL TERPIL WAKTU	Makna Indikator: PENGIRITAN SURAT PERINTAH PENGEMBALAN (SPD) YANG DIPERIKSAKAN UNTUK MENYERIKAN (DALAM LEWAT BANK YANG DITULUK DAN DIPERIKSAKAN UNTUK AMBILAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DIKIRI SEGERA DITUNJUK DARI DAMPAK TERSEBUT DENGAN CEPAT Alasan Pemilihan: SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAKA PEMERINTAH SPDO PALING LAMA 2 DARI KIRI KERJA TERKURUNG SEBUH DITERIMAKA SURAT PERINTAH MENYERIKAN (SPM) Cara Penghitungan Indikator: Jumlah SPD yang TERPIL TERPIL WAKTU / JUMLAH SPD PEMERINTAH KOTA BANJARBARU YANG TELAH DITUNJUK	Bidang Pelaksanaan dan Anggaran	Angka SPD
		PERSENTASE KESEKUTUPAN NILAI NERACA SWD SAMA DENGAN MELI DMD DALAM NERACA KEUANGAN	Makna Indikator: KEKUTUPAN PENGELOLAAN BIDANG MELI DAERAH YANG TERPIL SECARA ADMINISTRASI MAUPUN FISK Alasan Pemilihan: SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MELI DAERAH Cara Penghitungan Indikator: TOTAL NILAI SWD DARI DATA ASET AKUM NERACA PEMERINTAH X 100%	Bidang Pelaksanaan dan Anggaran	Laporan SWD DMD

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD TAHUN 2024					
INSTANSI	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU			
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan			
FUNGSI	:	1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Pengelolaan urusan kesekretariatan 5. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya			
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, alasan Pemilihan Indikator dan Cara Penghitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MELI DAERAH	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN SWD BAKA DAERAH YANG DITETAPKAN TERPIL WAKTU	Makna Indikator: LAPORAN KEUANGAN BAKA DAERAH YANG MELI DAERAH DARI SPDO DAPAT DIPERIKSAKAN MAUPUN DARI TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDUNGAN YANG BERLAKU Alasan Pemilihan: DITENTUKAN DARI DI DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAKA PELAKSANAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DARI 17 LAPORAN KEUANGAN SPDO DITUNJUK KEPADA KEPALA DAERAH MELI DAERAH DARI PALING LAMA 3 (TIGA) BAKA SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR Cara Penghitungan Indikator: LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TERPIL WAKTU ADALAH TANGGAL 31 BAKA	Bidang Pelaksanaan dan Anggaran	Jumlah Laporan



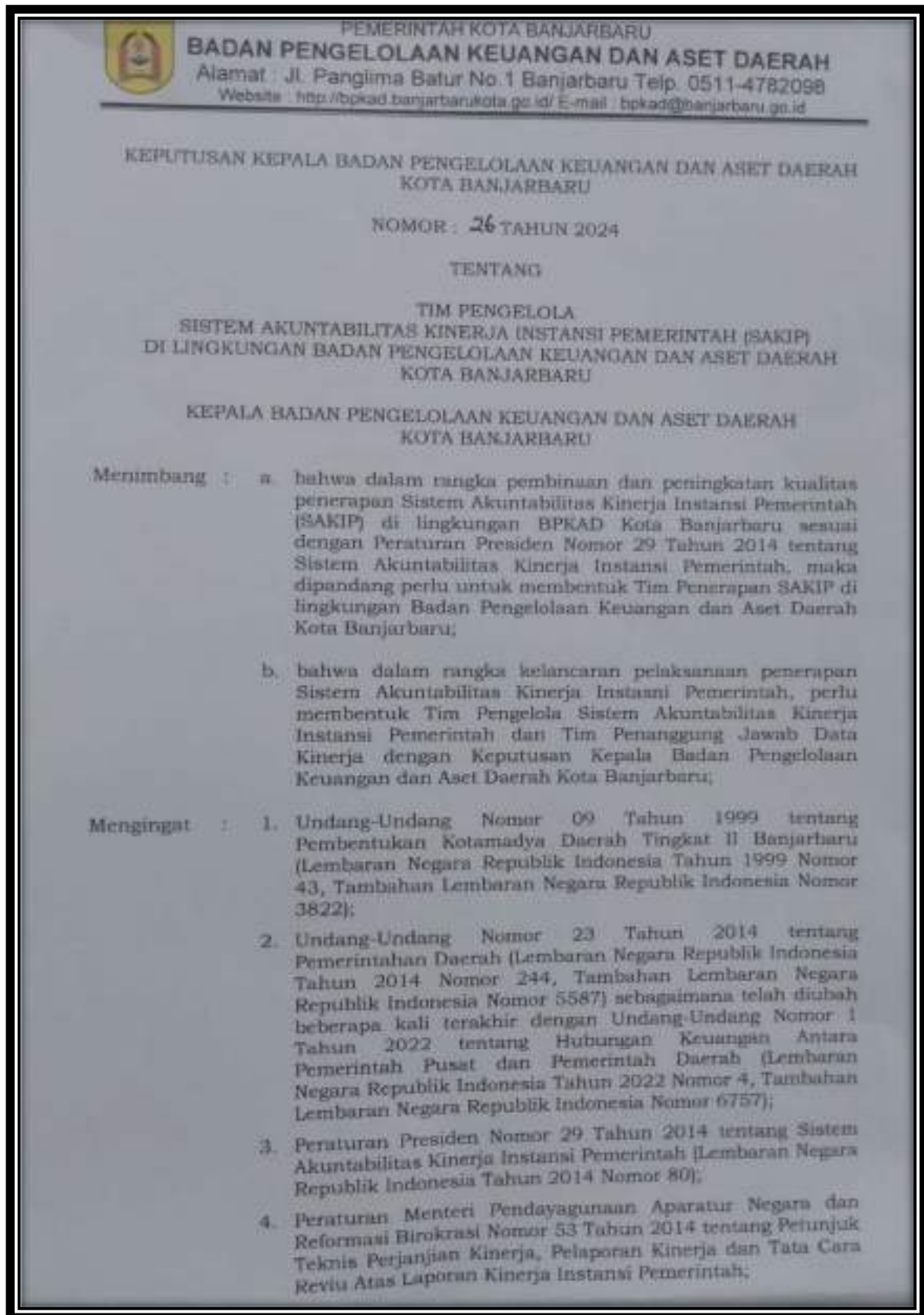
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Disyahkan: 03 Januari 2024
KEPALA BADAN,

H. JAINA DIN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630910 198602 1 008



5. SK Tim Pengelola SAKIP Tahun 2024





5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk :

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

4. Pengelolaan Data Kinerja;
5. Pelaporan Kinerja; dan
6. Review dan Evaluasi Kinerja.

- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perencanaan Kinerja;
- h. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 02 Januari 2024

PENGGUNA ANGGARAN,



H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 198602 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (Sebagai Laporan)
2. Inspektorat Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Nomor : 24 TAHUN 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANJARBARU

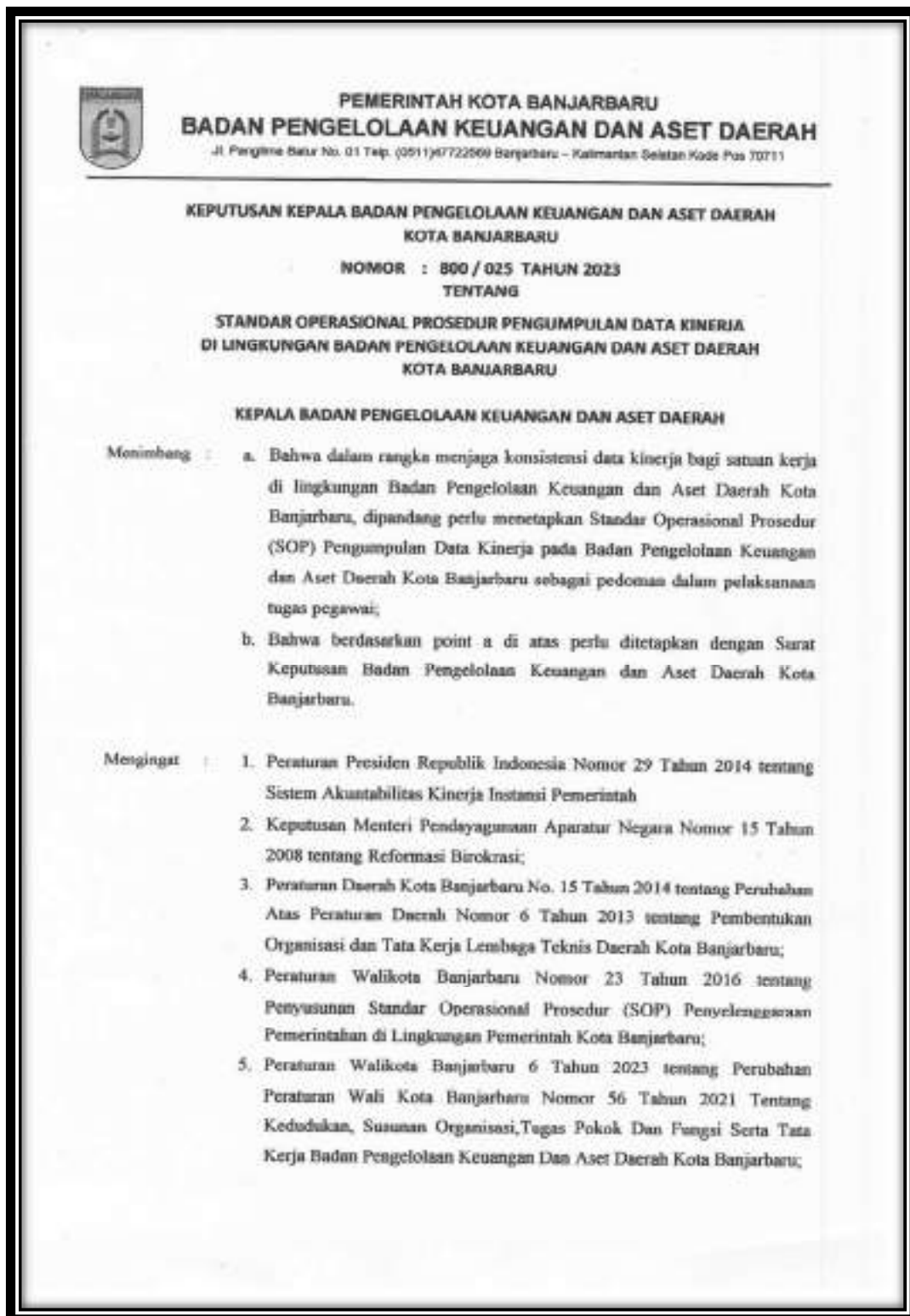
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung jawab	Kepala BPKAD
2.	Ketua	Sekretaris BPKAD
3.	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan 6. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan 7. Kepala Sub Regulasi Perbendaharaan, Dana Transfer Kevragian Daerah 8. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran 10. Kepala Sub Bidang Regulasi Dan Kebijakan Anggaran 11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah 12. Kepala Sub Bidang Pemertananganan, Pemisahan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah 13. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.	Tim Teknis	1. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Banjarbaru,


H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
Penjabat Lektor Muda
NIP. 19650910 198002 1 005



6. SK SOP Pengumpulan Data Tahun 2024





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
- Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diinjeksi kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru


H. JAUUDIN S.Sos. M.P.
Widyaiswara Muda
NIP. 198105101986021008



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
NOMOR : Tahun 2023
TANGGAL : 2023

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA

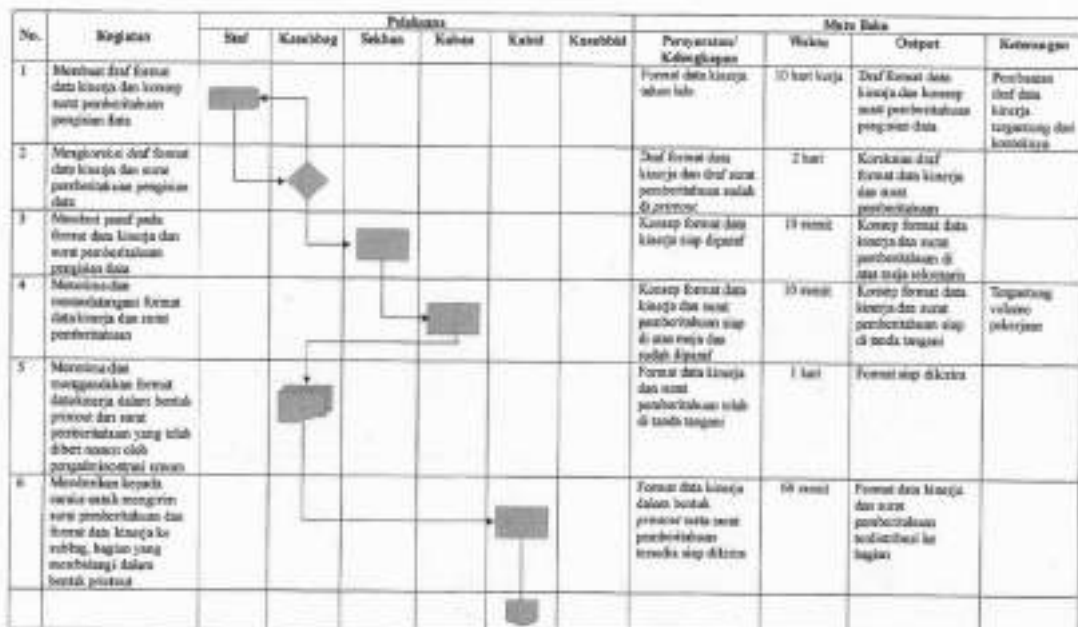
	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP : SOP/BPKAD.3
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN KEUANGAN TRIWULAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tgl Pembuatan : 2023
		Tgl Revisi : -
		Tgl Efektif : -
		Dibuatkan Oleh : Kepala BPKAD
		Nura SOP : Pengumpul Data Kinerja

Tujuan:	Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan dan menstandarkan kegiatan yang efektif untuk mendukung terlaksananya kegiatan operasional pengumpulan data kinerja dan keuangan triwulan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
Ruang Lingkup:	Prosedur ini berkaitan dengan kegiatan operasional pengumpulan data kinerja dan keuangan triwulan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
Definisi:	- Data Kinerja : Sasaran, indikator, target, realisasi, dan pencapaian capaian kinerja tiap triwulan - Data Keuangan : Pengeluaran/Keluaran, anggaran, realisasi, dan pencapaian penyempurnaan anggaran komparatif tiap triwulan
Tanggung Jawab:	- Kepala Badan : Menetapkan kebijakan yang terkait dengan kinerja dan keuangan - Sekretaris Badan : Menetapkan kebijakan yang terkait dengan operasional pengumpulan data kinerja dan keuangan - Kepala Sub Bagian Perencanaan : Melakukan urusan teknis pengumpulan data dengan kebijakan yang telah ditetapkan - Kepala Bidang : Melakukan kegiatan operasional pengumpulan data sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan - Pegawai Umum Lain dan Laporan : Melakukan kegiatan teknis operasional pengumpulan data sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
Tgl Wastuasi Yang Terkait	Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Subbag Perencanaan selaku Pengelola Urusan LAKIP dan Laporan Tahunan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru 2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2016 tentang Peraturan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru 3. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas/Fungsi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan & Kelurahan Kota Banjarbaru	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Sekretaris Badan 3. Kasubbid/Kasubbag 4. Staf Pemasukan (SP/SP1/SP2/SP3/SP4) 5. Penyedia Form Perhitungan Perjanjian Kinerja, Pengumpulan Data 6. Penyelesaian Data, dan Pengolah Data
Keterkaitan : 1. SOP Data dan Informasi	Peralatan/Perlengkapan : 1. Ruangan Kerja 2. Komputer 3. Printer 4. Internet / Wifi 5. Alat Tulis
Peringatan : 1. Ketidakefektifan dalam pengumpulan data kinerja dapat berdampak negatif terhadap kinerja	Proses dan Pendataan : Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kegiatan	Pelaksana						Materi Baku		
		Staf	Kasubag	Teknis	Kabisa	Kabid	Kasubbid	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Keterangan
7	Memeriksa dan verifikasi data data kinerja dari sub bag/Kasubbid							Data kinerja dari sub bag/Kasubbid	30 menit/bagian	
8	Menginput dan memverifikasi data kinerja kepada Kasubag yang membina							Data kinerja dari sub bag/Kasubbid	30 menit/bagian	
9	Validasi data kinerja							Data kinerja dari sub bag/Kasubbid	5 hari	
10	Memperbaiki data kinerja							Data kinerja dari sub bag/Kasubbid	5 menit	
11	Memendukung data kinerja							Data kinerja	5 menit	

Dokumen Terkait

- Rencana RKPAAD
- Rencana Kerja Tahunan RKPAAD
- DPA/RP RKPAAD
- Perjanjian Kinerja RKPAAD
- Laporan Realisasi Anggaran
- Data Kegiatan pada Bidang di lingkungan DEPKADP



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

i. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2023

 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Jalan A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712 Telepon (0511) 4784295 Faksimile (0511) 4784296, email banjarmain@bpk.go.id	
Banjarbaru, 3 Mei 2024	
Nomor : 13.b/S-LHP/XIX.BJM/04/2024	Kepada
Lampiran : 2 (dua) berkas	Yth. Wali Kota Banjarbaru
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2023	di Banjarbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 1. Opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a. Penerimaan Pajak Daerah Belum Dikelola dengan Tertib, diantaranya belum adanya kerja sama antara BPPRD dan Bank Kalsel terkait metode pembayaran pajak secara non tunai, penetapan kasir dan rekonsiliasi penerimaan; penerapan dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); serta potensi pajak restoran dan penastusahaan atas pajak reklame belum dikelola dengan tertib. Hal ini berdampak pada potensi terjadinya selisih pendapatan atas penerimaan pajak, adanya kurang bayar dan lebih bayar BPHTB, serta potensi pendapatan pajak restoran tidak terpungut untuk dapat dimanfaatkan oleh Pemkot Banjarbaru; dan b. Dividen PTAM Intan Banjar Belum Seluruhnya Diterima dan Penyajian Penyertaan Modal pada BMT Al Mu'awanah Belum Menggambarkan Kondisi Sebenarnya, sehingga berdampak pendapatan atas dividen PTAM Intan Banjar tidak bisa langsung	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

dimanfaatkan oleh Pemkot Banjarbaru dan adanya ketidakjelasan status penyertaan modal pada BMT Al Mu'awanah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Banjarbaru antara lain agar:

1. Meninjau kembali Peraturan Wali Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang belum selaras dengan Peraturan Daerah dan Undang-Undang tentang HKPD;
2. Menginstruksikan Kepala BPPRD untuk:
 - a. Melakukan pemutakhiran sistem aplikasi eBPHTB khususnya untuk pemberian/pengenaan NPOTKP sesuai ketentuan yang berlaku, serta secara tertib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi pengajuan BPHTB; dan
 - b. Memutakhirkan data objek pajak melalui pendataan dan pendaftaran objek pajak baru, serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan piutang pajak *Official Assessment* dan *Self Assessment*.
3. Kepala Bapperida selaku komisaris PTAM Intan Banjar dari Pemkot Banjarbaru bersama dengan Kepala BPKAD agar berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pemerolehan atas dividen dari penyertaan modal kepada PTAM Intan Banjar; dan
4. Kepala BPKAD agar melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pemilik BMT Al Mu'awanah untuk mendapatkan kepastian dan komitmen dari pihak BMT Al Mu'awanah terhadap penyertaan modal Pemkot Banjarbaru sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 13.A/LHP/XIX.BJM/04/2024 dan Nomor 13.B/LHP/XIX.BJM/04/2024 masing-masing bertanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,

Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196812101996031002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Sekretaris Jenderal BPK;
3. Inspektur Utama BPK; dan
4. Tortama KN VI.